

ARAH KEBIJAKAN DAK INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2022

Oleh

Riono Suprpto, SE. ST. MT.

Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah



JAKARTA, 07 Oktober 2021



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022



1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai **respon dampak pandemi COVID-19**.



2. Melanjutkan penguatan atas **pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah**.



3. **Mendukung pencapaian prioritas nasional** melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).



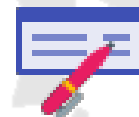
4. Mendukung pemulihan pelaku **UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM** (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK Fisik Perdagangan.



5. **Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional**.



6. Memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh **sumber pendanaan lainnya** (Belanja K/L, Pinjaman, KPBU).



7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui **penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan**.



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022

DAK FISIK REGULER

Rp. 13.298.810.091.000

Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Penyiapan SDM Berdaya Saing (termasuk penanganan stunting) Infrastruktur Dasar



Jalan

PEMDA PENERIMA → 491 PEMDA
Alokasi Rp. 7.298.810.091.000



Air Minum

PEMDA PENERIMA → 470 PEMDA
Alokasi Rp. 3.000.000.000.000



Sanitasi

PEMDA PENERIMA → 477 PEMDA
Alokasi Rp. 2.000.000.000.000



Perumahan

PEMDA PENERIMA → 244 PEMDA
Alokasi Rp. 1.000.000.000.000

DAK FISIK PENUGASAN

Rp. 6.366.356.726.000

Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah



Jalan

PEMDA PENERIMA → 81 PEMDA
Alokasi Rp. 794.600.662.000

Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan



Jalan

PEMDA PENERIMA → 249 PEMDA
Alokasi Rp. 2.700.880.000.000



Irigasi

PEMDA PENERIMA → 247 PEMDA
Alokasi Rp. 1.500.000.000.000

Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



Jalan

PEMDA PENERIMA → 75 PEMDA
Alokasi Rp. 1.370.876.064.000

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022

JENIS PENUGASAN (BID. IRIGASI)

TEMATIK II (FOOD ESTATE)

- Memfasilitasi dan mendukung pengembangan *food estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan.
- Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *food estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan.

Lokasi Prioritas Bid. Irigasi

1

Provinsi

5 Provinsi Food Estate dan 7 Provinsi Pendukung Food Estate serta 19 Provinsi Sentra Produksi Pangan

31 Pemda

2

Kabupaten/Kota

7 Kab/Kota Food Estate dan 41 Kab/Kota Pendukung Food Estate dan 240 Kab/Kota sentra Produksi Pertanian

288 Pemda

DETAIL MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

BIDANG IRRIGASI TA 2022

No	Menu	Rincian Menu	Output	Komponen
1	Pembangunan Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi	Ha	1. Bangunan Utama : Bendung, Embung, Free Intake, Sumur Bor, Rumah Pompa; 2. Saluran : Pembawa (Primer, Sekunder), Suplesi, dan Pembuang; 3. Bangunan Pelengkap : Bangunan Bagi, Sadap, Bagi Sadap, Bangunan Pengukur Debit, Gorong-gorong, Sipon, Talang, Terjun, Tanggul
2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Meter	Bangunan perlindungan dan penguatan tebing sungai Kolam retensi



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022



JENIS REGULER

BID. JALAN DAN JEMBATAN

- Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota.
- Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.



Lokasi Prioritas



33 Provinsi dan
508 Kab / Kota



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022



JENIS PENUGASAN (BID. JALAN)

TEMATIK I (PARIWISATA, IKM)

- Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah.

TEMATIK II (FOOD ESTATE)

- Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

TEMATIK III (KONEKTIVITAS KTI)

- Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.



Lokasi Prioritas



Tematik I

20 Provinsi dan
89 Kab / Kota

Tematik II

23 Provinsi dan
230 Kab / Kota

Tematik III

6 Provinsi dan
83 Kab / Kota

DETAIL MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

BIDANG JALAN TA 2022

No	Menu	Rincian Menu	Output	Komponen
1	Penanganan Jalan	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan2. Rekonstruksi Struktur Kapasitas Jalan3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan/Rekonstruksi Struktur Kapasitas Jalan4. Pelebaran Jalan (khusus DAK Penugasan)5. Pembangunan Jalan (khusus DAK Penugasan)	Km	-
2	Penanganan Jembatan	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan2. Penggantian Jembatan3. Pembangunan Jembatan (khusus DAK Penugasan)	Meter	-



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022

JENIS REGULER

BID. AIR MINUM

- Mewujudkan percepatan pembangunan air minum di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan Major Project Pembangunan Akses Air Minum Perpipa 10 Juta Sambungan Rumah (SR).
- Mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target SDGs
- Penyediaan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (idle capacity) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru.

Lokasi Prioritas Bid. Air Minum

1

Afirmasi

Daerah Afirmasi dan kawasan prioritas pedesaan nasional (KPPN) (62 Kabupaten)

2

Kumuh

Lokpri Penanganan Kaw. Kumuh Perkotaan (38 Kabupaten/Kota)

3

Stunting

Prioritas penanganan stunting yang belum diintervensi Pusat (154 Desa se Indonesia)

4

Pamsimas

Lokasi Pasca Pamsimas berkinerja hijau (24.920 desa se Indonesia) dan desa baru pamsimas (IMAS II) (348 Desa se Indonesia)

5

SPAM Regional

Kab/Kota dalam pelayanan SPAM Regional (22 Kabupaten/Kota)

6

SPAM Regional Provinsi

Provinsi yang sedang konstruksi SPAM Regional (Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan)

DETAIL MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

BIDANG AIR MINUM TA 2022

No	Menu	Rincian Menu	Output	Komponen	
1	Perluasan SPAM JP	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	SR	- Reservior - Pompa	- Jaringan Perpipaan - SR
2	Pembangunan SPAM JP	Pembangunan IPA/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi	SR	- IPA - Broncaptering - Sumur Pompa - Pompa	- Reservior - Jaringan Perpipaan - SR
3	Peningkatan SPAM JP	Uprating IPA / Penambahan sumur dalam terlindungi/ Broncaptering	SR	- Penambahan IPA - Penambahan Sumur - Penambahan Broncaptering	- Pompa - Reservoir - Jaringan Perpipaan - SR
4	Pembangunan JDU SPAM Regional	Pembangunan JDU	Lpd	Jaringan Perpipaan	
5	Pembangunan BJP Komunal	Pembangunan sumur dalam terlindungi/penampung air hujan/Pembangunan penangkap mata air	RT	- Sumur dalam - Bangunan PAH	- Bangunan Penangkap Mata Air - Kran Umum

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022

JENIS REGULER

BID. SANITASI

- Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi;
- Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2020-2024, serta pertumbuhan ekonomi akibat dampak COVID-19 secara nasional;
- Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Lokasi Prioritas Bid. Sanitasi

1

SSK

Zona 3 dan 4 untuk Air
Limbah dan Persampahan
(19.102 Desa se Indonesia)

2

Kumuh

Lokpri **Penanganan**
Kaw. Kumuh Perkotaan
(38 Kabupaten/Kota)

3

Stunting

Prioritas penangan stunting
yang belum diintervensi Pusat
(154 Kabupaten/Kota)

4

Afirmasi

Daerah Afirmasi dan KPPN
(62 Kabupaten/Kota)

5

IPLT dan LLT

Kab/Kota yang memiliki IPLT
(34 Kabupaten/Kota)

DETAIL MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

BIDANG SANITASI TA 2022

No	Menu	Rincian Menu	Output	Komponen
1	SPALD-T	IPAL Skala Permukiman min 50 KK	Unit	- IPAL - Sambungan Rumah
		IPAL + MCK minimal 50 KK	Unit	- IPAL Kombinasi MCK - Sambungan Rumah
		Penambahan Pipa Pengumpul dan SR	SR	Sambungan Rumah
2	SPALD-S	Tangki Septik Komunal (5 – 10 KK)	Unit	- Tangki Septik Komunal - Sambungan Rumah
		Tangki Septik individual perdesaan min 50 KK	Unit	-
		Tangki Septik Individual perkotaan min 50 KK	Unit	-
		Pengadaan Truk Tinja	Unit	-
3	Persampahan	TPS 3R	Unit	- Bangunan TPS 3R - Alat sortir sampah - Alat pencacah sampah - Alat composting - Motor sampah

ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR TA 2022

JENIS REGULER

BID. PERUMAHAN

- Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh, lokasi afirmasi, KPPN, terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah

Lokasi Prioritas Bid. Perumahan

1

Rumah Swadaya

509 Kabupaten/Kota di
Indonesia

2

Rumah Khusus

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
Utara, NTT, Maluku, Maluku Utara,
Papua & Papua Barat
74 Kab/Kota

3

DAK Integrasi

(Rumah, Air minum, Sanitasi, dan PSU)

48 Kab/Kota yang memenuhi
kriteria umum

DETAIL MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

BIDANG PERUMAHAN TA 2022

No	Menu	Rincian Menu	Output	Komponen
1	Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi	Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Unit	-
		Peremajaan Kawasan in-situ Permukiman Kumuh melalui Konsolidasi Lahan	Unit	-
		Rehabilitasi/Rekonstruksi Lahan dan Rumah Terdampak	Unit	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	-
		Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Ha	- Jalan Lingkungan - Drainase Lingkungan
2	Penyediaan Hunian Layak	Pembangunan Baru Mengelompok Prasejahtera	Unit	-
		Pembangunan Baru Individu Prasejahtera	Unit	-
3	Penyediaan Rumah Khusus	Pembangunan Rumah Khusus	Unit	-

PERSIAPAN RENCANA KEGIATAN

READINESS CRITERIA DAK BIDANG IIRIGASI TA. 2022

Pembangunan & Peningkatan Jaringan Irigasi

- ☐ DED;
- ☐ Skema Jaringan;
- ☐ Skema Bangunan;
- ☐ Peta Geospasioal;
- ☐ RAB & AHSP;
- ☐ KAK;
- ☐ Dokumentasi Pekerjaan;
- ☐ Surat Pernyataan Kepala Daerah Tentang pemenuhan 8 Syarat Pembangunan DI Baru;
- ☐ Kesiapan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL dan UPL);dan
- ☐ Laporan Akhir Perencanaan.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- ☐ DED;
- ☐ Skema Jaringan;
- ☐ Skema Bangunan;
- ☐ Peta Geospasial;
- ☐ RAB & AHSP;
- ☐ KAK;
- ☐ Dokumentasi Pekerjaan;dan
- ☐ Laporan Akhir Perencanaan.

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

- ☐ Ketersediaan Studi Pengendalian Banjir/Studi Investigasi Desain (SID) & DED;
- ☐ Kesiapan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL & UPL);
- ☐ Status Lahan Tidak Bermasalah;
- ☐ Komitmen Kontribusi APBD dalam Pelaksanaan Pengendalian Banjir; dan
- ☐ PERDA SEMPADAN Sungai.

PERSIAPAN RENCANA KEGIATAN READINESS CRITERIA DAK BIDANG JALAN TA. 2022

Dokumen Teknis yang perlu disiapkan dan diasistensikan ke Balai/P2JN

- ☐ RAB;
- ☐ *Back up* volume per item pekerjaan;
- ☐ gambar rencana / *typical cross section*;
- ☐ kesiapan lahan;
- ☐ FS Jaringan Jalan (jika diperlukan);
- ☐ Perhitungan desain perkerasan dan bangunan pelengkap (jika sudah ada / direkomendasikan);
- ☐ Dokumentasi kondisi lapangan;
- ☐ Peta lokasi kegiatan;
- ☐ Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) untuk pekerjaan pelebaran/peningkatan kapasitas jalan termasuk pelebaran menuju standard (khusus DAK Penugasan rincian kegiatan Pelebaran Jalan);
- ☐ Wajib sudah siap DED N-1 oleh konsultan pihak ketiga (kontraktual) untuk kegiatan Pembangunan Jalan dan Kegiatan Pekerjaan Jembatan.

Dokumen Administrasi

- ☐ Lembar Kontrol data teknis SiPDJD yang sudah; ditandatangani oleh Kepala Daerah (scan warna);
- ☐ Berita Acara Kesepakatan Prioritas dengan Bappeda Provinsi;
- ☐ Surat Edaran mengenai Harga Satuan Material dan Bahan yang berlaku;
- ☐ Surat Pernyataan Kesiapan Lahan dari Kepala Daerah di atas materai (scan warna);
- ☐ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dokumen teknis dari Kepala Dinas di atas materai (scan warna);
- ☐ Berita Acara Rekapitulasi Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis Konsultasi Program DAK Bidang Jalan TA. 2022 dengan Balai/P2JN; dan
- ☐ Berita Acara Detail Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Teknis Konsultasi Program DAK Bidang Jalan TA. 2022 dengan Balai/P2JN.

PERSIAPAN RENCANA KEGIATAN

READINESS CRITERIA DAK BIDANG PERKIM TA. 2022

Bidang Air Minum

- Dokumen RISPAM
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- DED
- RAB
- Surat pernyataan kesiapan lahan
- Surat kesiapan lembaga pengelola
- Izin penggunaan air baku (khusus menu Pembangunan baru SPAM JP dan Peningkatan SPAM JP)

Bidang Sanitasi

- ☐ Surat Pertanggungjawaban Mutlak
- ☐ Dokumen SSK

Usulan (Air Limbah)

- ☐ Template DED
- ☐ Template RAB
- ☐ Surat Pernyataan Kesiapan lahan
- ☐ Surat kesiapan desa untuk mengerjakan & mengelola

Usulan *Truck* Tinja

- ☐ Spektek dan Harga dari Penyedia

Usulan Persampahan

- ☐ Template DED
- ☐ Template RAB
- ☐ Kesiapan Lahan Untuk TPS3R:
- ☐ Penerima Manfaat
 - ✓ Milik Pemerintah/Desa (sertifikat/akte jual beli)
 - ✓ Milik Masyarakat (sertifikat/akte jual beli dilampirkan akte hibah lahan)
- ☐ Konsep *business plan* pengelolaan TPS 3R Pasca konstruksi

PERSIAPAN RENCANA KEGIATAN READINESS CRITERIA DAK BIDANG PERKIM TA. 2022



Bidang Rumah Swadaya

Kab/Kota

- ☐ SPTJM Kepala Daerah
- ☐ SK Kumuh
- ☐ SK Masy.Prasejahtera
- ☐ Surat Komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan keswadayaan dan PSU

DAK Integrasi Kab/Kota

- ☐ Surat Kantor Pertanahan

Usulan

- ☐ SK Penetapan BNBA calon penerima
- ☐ Surat Kesediaan Pemda menyelesaikan permasalahan lahan
- ☐ Pemetaan penaganaan rumah
- ☐ Rencana pembagian kapling
- ☐ Bukti hibah/jual beli lahan
- ☐ BA Kesepakatan Warga
- ☐ DED
- ☐ RAB

Bidang Rumah Khusus

Kab/Kota

- ☐ SPTJM Kepala Daerah
- ☐ Gambaran Umum Proposal
- ☐ Surat Penetapan Lokasi

Usulan

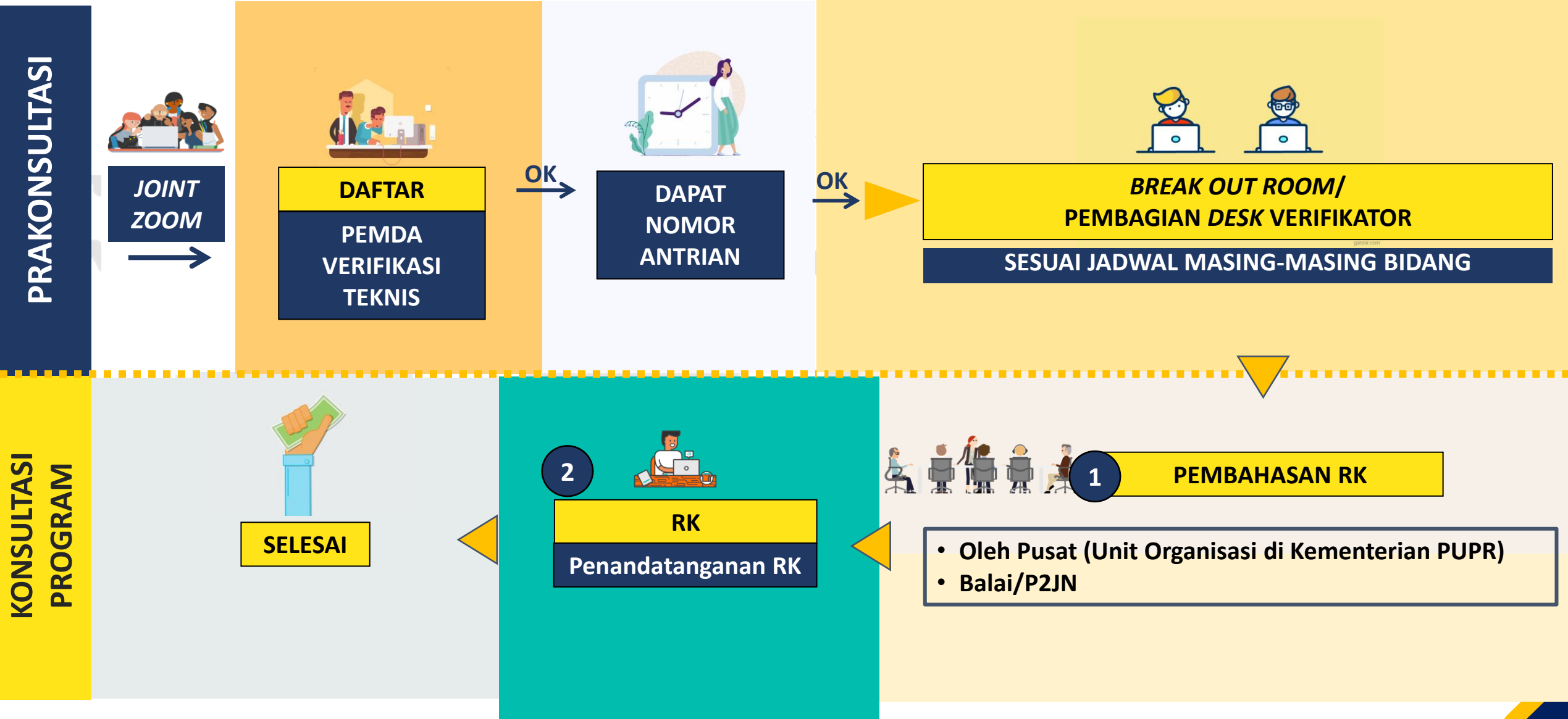
- ☐ Bukti legalitas kepemilikan tanah
- ☐ DED
- ☐ RAB

Bidang Perumahan Jalann & Drainase

- ☐ MASTERPLAN/
SITEPLAN
- ☐ DED
- ☐ RAB



MEKANISME DESK KONSULTASI PROGRAM



RENCANA JADWAL KONSULTASI PROGRAM DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR



TENTATIF



25-28 Oktober 2021

Gel- I (Wilayah Barat)

Pulau Sumatera



04-08 November 2021

Gel- II (Wilayah Tengah)

Pulau Kalimantan

Pulau Jawa

Pulau Bali



08-11 November 2021

Gel- II (Wilayah Timur)

Pulau Sulawesi

Pulau NUSTRA

Pulau Maluku

Pulau Papua

Keterangan :

Penyelenggaraan Desk Konsultasi Program DAK Fisik PUPR akan dilaksanakan secara **Online** dan **Offline**



KONTAK PIC SETIAP BIDANG

Bidang Irigasi

Natali (0852-7070-0209)

Arby (0818-0688-2701)

Bidang Jalan & Jembatan

Rani (0821-6039-5737)

Anggi (0852-6356-9772)

Bidang Perumahan Permukiman

Naufal (0812-8386-3772)

Gede (0838-6623-0001)



TERIMA KASIH





TERIMA KASIH



MASUKAN JUKNIS DAK TA. 2022



No.	Hal	Semula	Menjadi
1.	Tema	<p>DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;b. Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak;c. Ketahanan Pangan; dand. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	<p>DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengahb. Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewanic. Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



MASUKAN JUKNIS DAK TA. 2022



No.	Hal	Semula	Menjadi
2.	Pengaturan tambahan mengenai Pelaksanaan DAK Fisik	<ul style="list-style-type: none">Persentase Kegiatan (Dana) Penunjang paling banyak 5% dari alokasi bidang/subbidang DAK Fisik atau jumlah lain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.Perubahan ditetapkan dalam PMK setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.Penekanan kegiatan (dana) penunjang DAK Fisik untuk membiayai kegiatan penunjang DAK Fisik pada tahun berkenaan. <p>Pengaturan Revisi PMK 130 :</p> <ul style="list-style-type: none">Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik.Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAK Fisik, dana penunjang ditetapkan paling banyak 5% dari perubahan alokasi.	<ul style="list-style-type: none">Persentase Kegiatan (Dana) Penunjang paling banyak 5% dari alokasi bidang/ subbidang DAK FisikPenekanan kegiatan (dana) penunjang DAK Fisik untuk membiayai kegiatan penunjang DAK Fisik pada tahun berkenaan.

MASUKAN JUKNIS DAK TA. 2022



No.	Hal	Semula	Menjadi
3.	Usulan Perubahan RK	Persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima.	Dalam hal revisi RK melibatkan BPKP, Persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima.



MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK)



POIN-POIN PENTING PERUBAHAN KEBIJAKAN



Penambahan tematik:
Penguatan
Sentra Industri
Kecil Menengah



Revisi RK
melibatkan
BPKP



Persentase
Kegiatan (Dana)
Penunjang paling
banyak 5% dari
alokasi bidang/
subbidang DAK
Fisik



Penekanan
kegiatan (dana)
penunjang DAK Fisik
untuk membiayai
kegiatan penunjang
DAK Fisik pada
tahun berkenaan.



Penambahan
tematik:
Pengembangan
Food Estate dan
Sentra Produksi
Pangan



Penambahan tematik:
Peningkatan
Konektivitas Kawasan
untuk Pembangunan
Inklusif
di wilayah Nusa
Tenggara, Maluku,
dan Papua

